

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjukNya sehingga penyusunan **Peta Jalan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Bandung 2017-2019** dapat diselesaikan. Peta Jalan ini merupakan langkah awal dan landasan utama dalam menjalankan momentum reformasi birokrasi di Politeknik Negeri Bandung (Polban).

Pada tingkat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, reformasi birokrasi telah dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai tahun 2014. Sementara itu, di Polban, upaya untuk menyelenggarakan tata kelola institusi guna mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani telah dilaksanakan dalam berbagai aspek. Meskipun demikian, upaya ini belum dilakukan secara sistematis, terencana dan terstruktur. Sementara, peningkatan kualitas pelayanan publik semakin menjadi tuntutan masyarakat sekaligus menjadi kebutuhan Polban sebagai institusi publik.

Reformasi birokrasi adalah proses yang berkesinambungan seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah yang dihadapi Polban, saat ini dan di masa mendatang. Karena itu, agenda reformasi birokrasi Polban juga perlu dilanjutkan dalam periode berikutnya, setelah pada saatnya nanti mengevaluasi pencapaian program-program aksi dalam Peta Jalan 2017-2019 ini.

Searah dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019, program-program reformasi birokrasi Polban juga meletakkan fokus pada delapan area perubahan, yakni 1) manajemen perubahan; 2) penguatan pengawasan; 3) penguatan akuntabilitas kinerja; 4) penguatan kelembagaan; 5) penguatan tatalaksana; 6) penguatan sistem manajemen SDM aparatur; 7) penguatan peraturan perundang-undangan; dan 8) peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area perubahan “peningkatan pelayanan publik,” ditetapkan satu program *quick wins* yakni pembentukan *Unit Layanan Terpadu*.

Kita menyadari bahwa upaya ini tidak hanya membutuhkan sumber daya yang memadai, tetapi juga waktu, tenaga dan kontribusi dari semua unsur di Polban. Karena itu, pada tahap awal diperlukan kesamaan visi dan semangat untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Diperlukan sinergi dari semua pihak, mulai dari pemimpin, unit kerja, pegawai, maupun elemen lain di Polban. Pemimpin harus menjadi contoh untuk mereformasi dan melakukan perubahan. Pemimpin pada semua jenjang organisasi perlu mengelola tingkat perubahan yang seharusnya terjadi pada unit kerja, dengan menjadi agen perubahan maupun manajer perubahan itu sendiri.

Dokumen peta jalan ini merupakan panduan utama pelaksanaan reformasi birokrasi di Polban. Peta jalan ini memberi arah bagi rencana aksi pada setiap area perubahan reformasi birokrasi

dan bagi perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sistematis dan aplikatif.

Untuk mewujudkan peta jalan ini, Politeknik Negeri Bandung berkomitmen dan berikhtiar, dengan sumber daya yang dimiliki, untuk selalu meningkatkan kinerja dan menyelesaikan reformasi birokrasi. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung bertekad untuk mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani.

Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum
dan Keuangan selaku
Ketua Tim RB Politeknik Negeri Bandung,

Dr. Muhamad Umar Mai, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
Ringkasan Eksekutif.....	1
Bab I Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Hukum.....	3
C. Kerangka Reformasi Birokrasi.....	4
Bab II Gambaran Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi	7
A. Kondisi Tata Kelola Politeknik Negeri Bandung	7
B. Permasalahan Program Reformasi Birokrasi	9
Bab III Agenda Reformasi Birokrasi	13
A. Manajemen Perubahan	13
1. Capaian	15
2. Rencana	15
3. Kriteria Keberhasilan	16
4. Agenda Prioritas	17
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	17
6. Penanggung Jawab	18
7. Rencanan Anggaran	18
B. Penguatan Sistem Pengawasan	19
1. Capaian	20
2. Rencana	21
3. Kriteria Keberhasilan	21
4. Agenda Prioritas	21
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	21
6. Penanggung Jawab	23
7. Rencanan Anggaran	23
C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	23
1. Capaian	24
2. Rencana	24
3. Kriteria Keberhasilan	25
4. Agenda Prioritas	26
5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	26
6. Penanggung Jawab	27
7. Rencanan Anggaran	28
D. Penguatan Peraturan Perundang-undangan	28
1. Capaian	29
2. Rencana	30

3.	Kriteria Keberhasilan	30
4.	Agenda Prioritas	31
5.	Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	31
6.	Penanggung Jawab	34
7.	Rencanan Anggaran	34
E.	Penguatan Kelembagaan	35
1.	Capaian	37
2.	Rencana	37
3.	Kriteria Keberhasilan	39
4.	Agenda Prioritas	40
5.	Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	40
6.	Penanggung Jawab	44
7.	Rencanan Anggaran	44
F.	Penguatan Tata Laksana	45
1.	Capaian	46
2.	Rencana	48
3.	Kriteria Keberhasilan	48
4.	Agenda Prioritas	48
5.	Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	49
6.	Penanggung Jawab	51
7.	Rencanan Anggaran	52
G.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	52
1.	Capaian	52
2.	Rencana	53
3.	Kriteria Keberhasilan	53
4.	Agenda Prioritas	54
5.	Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	55
6.	Penanggung Jawab	60
7.	Rencanan Anggaran	60
H.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	61
1.	Capaian	62
2.	Rencana	63
3.	Kriteria Keberhasilan	64
4.	Agenda Prioritas	65
5.	Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	66
6.	Penanggung Jawab	68
7.	Rencanan Anggaran	68
I.	<i>Quick Wins</i> : Unit Layanan Terpadu	68
1.	Capaian	69
2.	Rencana	71
3.	Kriteria Keberhasilan	72
4.	Agenda Prioritas	72
5.	Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja	72
6.	Penanggung Jawab	73

	7. Rencanan Anggaran	73
Bab IV	Monitoring dan Evaluasi	74
	A. Monitoring	74
	B. Evaluasi	75
Bab V	Penutup	77
	Lampiran	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	7
Gambar 3.1 Organisasi dan tata kerja POLBAN berdasarkan Statuta tahun 2006	35
Gambar 3.2 SOTK berdasarkan Surat Keputusan Direktur POLBAN No. 0035.1/PL1/OT/2015 dan SK Direktur No. 2714/PL1/KP/2014	36
Gambar 3.3 Keterkaitan antar kegiatan Program Penguatan Kelembagaan POLBAN Tahapan pelaksanaan untuk kegiatan Program Penguatan Kelembagaan POLBAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Aksi Kegiatan Manajemen Perubahan.....	16
Tabel 3.2 Kriteria Keberhasilan Manajemen Perubahan	16
Tabel 3.3 Indeks Capaian Manajemen Perubahan	17
Tabel 3.4 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengembangan Nilai-Nilai untuk Menegakkan Integritas	17
Tabel 3.5 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembentukan Agen Perubahan Yang dapat Mendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir	18
Tabel 3.6 Rencana Anggaran Program Manajemen Perubahan	19
Tabel 3.7 Kriteria Keberhasilan Penguatan Sistem Pengawasan	21
Tabel 3.8 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Sistem Pengawasan dan Kapabilitas APIP	22
Tabel 3.9 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Implementasi SPIP.....	22
Tabel 3.10 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja WBK/WBBM	23
Tabel 3.11 Rencana Anggaran Penguatan Sistem Pengawasan	23
Tabel 3.12 Penilaian AKIP POLBAN	24
Tabel 3.13 Nilai Kinerja POLBAN	26
Tabel 3.14 Capaian Akuntabilitas POLBAN	26
Tabel 3.15 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja ..	27
Tabel 3.16 Rencana Anggaran Penguatan Akuntabilitas Kinerja	28
Tabel 3.17 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pemetaan dan Evaluasi Peraturan..	31
Tabel 3.18 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan Peraturan	32
Tabel 3.19 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengendalian dan Pemantauan Penyusunan Peraturan	32
Tabel 3.20 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengkajian dan Penataan Peraturan	32
Tabel 3.21 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengembangan Kompetensi Perancangan dan Penyusunan Peraturan	33
Tabel 3.22 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Sosialisasi Peraturan yang telah Ditetapkan dan Diundangkan	33
Tabel 3.23 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pendokumentasian dan Publikasi Peraturan	33
Tabel 3.24 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Peraturan	34

Tabel 3.25 Rencana Anggaran Penguatan Peraturan Perundang-undangan	34
Tabel 3.26 Rencana Aksi Program Penguatan Kelembagaan POLBAN	38
Tabel 3.27 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Restrukturisasi organisasi POLBAN	41
Tabel 3.28 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyesuaian rincian tugas unit Kerja POLBAN	42
Tabel 3.29 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyesuaian organisasi POLBAN sesuai dengan perubahan kebijakan	42
Tabel 3.30 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penguatan unit/pusat Penunjang pelaksanaan tri dharma	43
Tabel 3.31 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi POLBAN	43
Tabel 3.32 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi di lingkungan POLBAN	44
Tabel 3.33 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	64
Tabel 3.34 Kriteria Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	65
Tabel 3.35 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan Standar dan Prosedur Baku Pelayanan Publik	66
Tabel 3.36 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Kementerian	67
Tabel 3.37 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Survei Kepuasan Masyarakat	67
Tabel 3.38 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembangunan Budaya Pelayanan Prima	67
Tabel 3.39 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja <i>Quick Wins</i> Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu	73

DAFTAR LAMPIRAN

A. Manajemen Perubahan	78
B. Penguatan Sistem Pengawasan	79
C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	80
D. Penguatan Kelembagaan	81-82
E. Penguatan Tata Laksana	83-84
F. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	85-87
G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan	88-89
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	90